

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan OPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu untuk tahun anggaran tanggal 31 Desember 2020 telah disusun.

Laporan keuangan ini disusun sebagai implementasi dari amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan ini disampaikan dengan meyajikan Laporan realisasi anggaran dimana menggambarkan anggaran tahun 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 yang berkenaan dengan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan, serta Catatan atas laporan keuangan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban maupun pengakuan Aset, Kewajiban dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA dan Belanja.

Demikian Laporan Keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan khususnya di Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, 31 Januari 2021
Pengguna Anggaran/ Barang

Ir. ARDHILLA

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip.196404261991031006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu terdiri dari : Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian pernyataan ini kami buat dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pasangkayu, 31 Januari 2021
Pengguna Anggaran/ Barang

Ir. ARDHILLA

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196404261991031006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Unsur Laporan Keuangan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	8
2.1. Ekonomi Makro.....	8
2.2. Kebijakan Keuangan.....	8
2.3. Program Pencapaian Target Kinerja.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	10
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan....	10
3.2. Hambatan dan Kendala.....	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	20
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	22
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	22
5.2. Penjelasan Laporan Operasional.....	23
5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	24
5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	25
BAB VI PENUTUP.....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASANGKAYU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Sedangkan tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 6.833.860.479,00 atau mencapai 99,46% dari anggaran sebesar Rp 6.870.494.338,00

b. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

d. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 39.974.878.418,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 66.661.100,00, investasi jangka panjang sebesar Rp 0,00, aset tetap sebesar Rp 39.838.825.893,00, dana cadangan sebesar Rp 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 69.391.425,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00. Adapun jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 39.974.878.418,00.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Sedangkan dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
16. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pasangkayu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Keempat atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, yang terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk di terapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu disajikan dengan urutan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Unsur Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB VI. PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu adalah di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu mempunyai 8 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah;
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; dan
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 memperoleh Anggaran Pendapatan sebesar Rp 60.000.000,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 6.870.494.338,00 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	6.344.704.338,00
2	Belanja Modal	525.790.000,00
Jumlah		6.870.494.338,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu selama Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/5x100)
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	60.000.000,00	65.061.000,00	108,43
2	Belanja			
	- Belanja Operasi	6.344.704.338,00	6.314.428.679,00	99,52
	- Belanja Modal	525.790.000,00	519.431.800,00	98,79
	Jumlah	6.870.494.338,00	6.833.860.479,00	99,46

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja untuk akhir tahun 2020 sebesar Rp 6.833.860.479,00 atau mencapai 99,46% . Dengan demikian belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp 36.633.859,00

atau 0,54% . Berikut program/kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi dirinci sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Per 31 Desember 2020
Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Program Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.435.250	5.435.250	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.290.000	41.290.000	100,00%
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15.025.250	15.025.250	100,00%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39.000.000	38.800.200	99,49%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.896.080	88.896.080	100,00%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.915.000	29.915.000	100,00%
7	Penyediaan alat tulis kantor	13.031.500	13.030.500	99,99%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.941.000	49.406.000	93,32%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.360.000	6.350.000	99,84%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.222.000	135.194.975	99,98%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.067.800	100.067.800	100,00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	102.610.000	98.163.600	95,66%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000	35.000.000	100,00%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.800.000	6.800.000	100,00%
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.650.000	12.640.000	99,92%
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	147.390.000	146.998.200	99,73%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3.450.250	3.150.250	91,30%
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.450.250	3.150.250	91,30%

3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.450.250	3.150.000	91,29%
4	Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah	-	-	0,00%
1	Penyelenggaraan pameran hasil-hasil pembangunan OPD	-	-	0,00%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	320.660.500	319.067.500	99,50%
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.126.032.050	1.125.855.550	99,98%
3	Penyediaan jasa persampahan	1.704.796.000	1.703.446.000	99,92%
4	Penyediaan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	70.000.000	56.677.000	80,96%
	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup			
1	Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura	-	-	0,00%
2	Penyediaan operasional laboratorium	40.740.000	40.740.000	100,00%
3	Penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	20.725.500	20.225.500	97,58%
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	500.000.000	500.000.000	100,00%
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	62.950.000	62.943.916	99,99%
1	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	62.950.000	62.943.916	99,99%
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	307.100.000	307.027.550	99,97%
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau	307.100.000	307.027.550	99,97%
	Jumlah	6.870.494.338	6.833.860.479	99,46%

3.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar anggaran dipangkas dan dialihkan ke penanganan pandemi covid-19 mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana dengan optimal.
3. Koordinasi dan sinkronisasi Dinas Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi dalam dan luar daerah kurang optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi/ sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian aset adalah sebagai berikut :

a) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- i. Biaya Perolehan ; apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- ii. Biaya Standar ; apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- iii. Nilai Wajar ; apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak

pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

d) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

e) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

f) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

g) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

h) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- i. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan kelokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- ii. Biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- iii. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 35 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Pendapatan

Saldo pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

b. Belanja

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam Tahun anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Alokasi anggaran tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp 6.870.494.338,00 yang terbagi ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran sebesar Rp 1.870.505.658,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.999.988.680,00. Per tanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 6.833.860.479,00 atau sebesar 99,46% dari total yang ada.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 6.314.428.679,00

2) Belanja Modal

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu meliputi :

- ✓ Belanja Modal peralatan dan Mesin
- ✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan

dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 519.431.800,00
dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi	
			2020	2019
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.010.000,00	359.043.600,00	1.138.395.950,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.390.000,00	146.998.200,00	34.878.000,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00
Jumlah		525.790.000,00	519.431.800,00	1.173.273.950,00

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Saldo Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 65.061.000,00

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Selama Tahun Anggaran 2020, beban pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu adalah sebesar Rp 12.864.165.964,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 7.755.216.250,50 yang meliputi :

1) Beban Operasi

Beban operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu memiliki realisasi pada tahun 2020 Rp

12.684.165.964,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.755.216.250,50 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	3.757.743.858,00	3.536.158.173,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.498.436.221,00	2.939.220.714,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.376.960.623,00	1.253.444.101,00
4	Beban Lain-lain	51.025.262,00	26.393.262,00
Jumlah		12.684.165.964,00	7.755.216.250,00

2) Beban Transfer

Saldo beban transfer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00

3) Beban Non Operasional

Saldo beban Non Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00

4) Beban Luar Biasa

Saldo beban Luar Biasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.998.370,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.854.098.506,50

b. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.204.074.383,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp (6.446.213.575,50)

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019

merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2020. Koreksi-koreksi tersebut bernilai Rp 0,00.

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
2	Selisi Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
4	Mutasi Aset Tetap	3.634.288,00	0,00
5	Koreksi Terhadap Utang	0,00	0,00
6	Koreksi Saldo Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7	Koreksi terhadap Piutang	0,00	0,00

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.974.878.418,00

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aset

Saldo aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.974.878.418,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	66.661.100,00	8.412.500,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	00
3	Aset Tetap	39.838.825.893,00	13.900.173.529,00
4	Dana Cadangan	0,00	00
5	Aset Lainnya	69.391.425,00	89.784.239,00
Jumlah		39.974.878.418,00	13.998.370.268,00

a. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.661.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
5	Persediaan	66.661.100,00	8.412.500,00
6	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Jumlah		66.661.100,00	8.412.500,00

- Kas

Saldo kas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 20120 sebesar Rp 0,00 terdiri atas :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

- Investasi Jangka Pendek

Saldo investasi jangka pendek pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

- Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

- Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

- Persediaan

Saldo persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.661.100,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
2	Materai	0,00
3	Alat dan Bahan Laboratorium	39.521.600,00
4	Cetak Retribusi	27.139.500,00
Jumlah		66.661.100,00

- Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

c. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.838.825.893,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.900.173.529,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tanah	146.700.000,00	146.700.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.516.815.728,00	12.265.464.605,00
3	Gedung dan Bangunan	29.835.207.194,00	3.059.121.759,00
4	Jalan, jaringan dan instalasi	11.687.593.252,00	6.513.162.252,00
5	Aset Tetap Lainnya	238.922.000,00	238.922.000,00
6	Pengerjaan dalam Konstruksi	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(14.586.412.281,00)	(8.323.197.087,00)
Jumlah Aset Tetap		39.838.825.893,00	13.900.173.529,00

Sedangkan jumlah penambahan nilai aset tetap dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 25.824.906.935,00 yang diperoleh dari jumlah total aset tetap tahun 2020 Rp 39.838.825.893,00 yang dikurangi dengan jumlah total aset tetap tahun 2019 Rp 13.900.173.529,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut .

➤ Tanah

Saldo Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 146.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Tanah Kantor	146.700.000,00
Jumlah	146.700.000,00
Penambahan	
Tanah	0,00
Jumlah	0,00

Penyesuaian/Koreksi		
Tanah		
	Jumlah	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Tanah		
	Jumlah	0,00
	Saldo Akhir	146.700.000,00

➤ Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.516.815.728,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal		
Peralatan dan Mesin		12.265.464.605,00
	Jumlah	12.265.464.605,00
Mutasi Barang		
Penambahan		394.219.977,00
Pengurangan		(142.868.854,00)
	Saldo Akhir	12.516.815.728,00

➤ Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 29.835.207.194,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal		
Gedung dan Bangunan		3.059.121.759,00
	Jumlah	3.059.121.759,00
Penambahan		
Hibah		26.662.138.347,00
Pembelian		113.947.088,00
	Jumlah	26.776.085.435,00
	Saldo Akhir	29.835.207.194,00

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.687.593.252,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Jalan, irigasi dan jaringan	6.513.162.252,00
Jumlah	6.513.162.252,00
Penambahan	
Hibah Instalasi pengolahan sampah	5.161.041.000,00
Realisasi belanja modal	13.390.000,000
Jumlah	5.174.431.000,00
Saldo Akhir	11.687.593.252,00

➤ Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 238.922.000,00

➤ Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.586.412.281,00

d. Dana Cadangan

Saldo dana cadangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

e. Aset Lainnya

➤ Tagihan Jangka Panjang

Saldo tagihan jangka panjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

➤ Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

➤ Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

➤ Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 69.391.425,00

2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

3. Ekuitas

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.974.878.418,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.998.370.268,00

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu sebagai bahan pertanggung jawaban suatu Organisasi Perangkat Daerah. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan OPD tiap akhir tahun anggaran. Hal- hal tersebut sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Realisasi anggaran tahun 2020 pada anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar 99,46% dan sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada saldo kas bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00
4. Neraca OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, menggambarkan posisi keuangan yakni posisi aset, kewajiban, ekuitas dan pada pos aset tetap telah dilakukan perhitungan penyusutan aset yang ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun berdasarkan penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasangkayu, 31 Januari 2021
Kepala Dinas,

Ir. ARDHILLA

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196404261991031006



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	66.661.100,00	8.412.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	66.661.100,00	8.412.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	146.700.000,00	146.700.000,00
Peralatan dan Mesin	12.516.815.728,00	12.265.464.605,00
Gedung dan Bangunan	29.835.207.194,00	3.059.121.759,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.687.593.252,00	6.513.162.252,00
Aset Tetap Lainnya	238.922.000,00	238.922.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(14.586.412.281,00)	(8.323.197.087,00)
JUMLAH ASET TETAP	39.838.825.893,00	13.900.173.529,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	69.391.425,00	89.784.239,00
JUMLAH ASET LAINNYA	69.391.425,00	89.784.239,00
JUMLAH ASET	39.974.878.418,00	13.998.370.268,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
Utang	0,00	0,00
Utang Dana Desa	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	39.974.878.418,00	13.998.370.268,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	39.974.878.418,00	13.998.370.268,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	60.000.000,00	65.061.000,00	108,44	61.040.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	60.000.000,00	65.061.000,00	108,44	61.040.000,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	60.000.000,00	65.061.000,00	108,44	61.040.000,00
5	BELANJA	6.870.494.338,00	6.833.860.479,00	99,47	7.651.525.337,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.344.704.338,00	6.314.428.679,00	99,52	6.478.251.387,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.770.585.658,00	3.757.743.858,00	99,66	3.536.158.173,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.574.118.680,00	2.556.684.821,00	99,32	2.942.093.214,00
5 . 2	BELANJA MODAL	525.790.000,00	519.431.800,00	98,79	1.173.273.950,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.010.000,00	359.043.600,00	98,37	1.138.395.950,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.390.000,00	146.998.200,00	99,73	34.878.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.390.000,00	13.390.000,00	100,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.810.494.338,00)	(6.768.799.479,00)	99,39	(7.590.485.337,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.810.494.338,00)	(6.768.799.479,00)	99,39	(7.590.485.337,00)

Pasangkayu, 1 Januari 2020

Kepala Dinas

Ir. ARDHILLA

NIP. 196404261991031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05	Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	31.888.240.347,00	1.309.002.675,00	30.579.237.672,00	2.336,07
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	65.061.000,00	61.040.000,00	4.021.000,00	6,59
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	65.061.000,00	61.040.000,00	4.021.000,00	6,59
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	31.823.179.347,00	1.247.962.675,00	30.575.216.672,00	2.450,01
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	31.823.179.347,00	1.247.962.675,00	30.575.216.672,00	2.450,01
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	12.684.165.964,00	7.755.216.250,50	4.928.949.713,50	63,56
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.757.743.858,00	3.536.158.173,00	221.585.685,00	6,27
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.498.436.221,00	2.939.220.714,00	(440.784.493,00)	(15,00)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.376.960.623,00	1.253.444.101,00	5.123.516.522,00	408,76
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	51.025.262,00	26.393.262,50	24.631.999,50	93,33
9.1.10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11	Beban Bagi Hasil - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 7	Beban Transfer Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<p>Pasangkayu, 1 Januari 2020</p> <p>Kepala Dinas</p> <p>Ir. ARDHILLA</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>NIP. 196404261991031006</p>					



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05	Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	31.888.240.347,00	1.309.002.675,00	30.579.237.672,00	2.336,07
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	65.061.000,00	61.040.000,00	4.021.000,00	6,59
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	65.061.000,00	61.040.000,00	4.021.000,00	6,59
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	31.823.179.347,00	1.247.962.675,00	30.575.216.672,00	2.450,01
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	31.823.179.347,00	1.247.962.675,00	30.575.216.672,00	2.450,01
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	12.684.165.964,00	7.755.216.250,50	4.928.949.713,50	63,56
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.757.743.858,00	3.536.158.173,00	221.585.685,00	6,27
9.1.2	Beban Persediaan	1.086.399.546,00	1.640.270.300,00	(553.870.754,00)	(33,77)
9.1.2	Beban Jasa	536.997.000,00	293.692.800,00	243.304.200,00	82,84
9.1.2	Beban Pemeliharaan	634.755.400,00	656.892.814,00	(22.137.414,00)	(3,37)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	240.284.275,00	348.364.800,00	(108.080.525,00)	(31,03)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.376.960.623,00	1.253.444.101,00	5.123.516.522,00	408,76
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	51.025.262,00	26.393.262,50	24.631.999,50	93,33

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 11	Beban Bagi Hasil - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)	25.650.287.958,50	(397,91)

Pasangkayu, 1 Januari 2020

Kepala Dinas

Ir. ARDHILLA

NIP. 196404261991031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 05	Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	13.998.370.268,00	12.854.098.506,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	19.204.074.383,00	(6.446.213.575,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Mutasi Aset Tetap	3.634.288,00	0,00
Koreksi Terhadap Utang	0,00	0,00
Koreksi Saldo Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Terhadap Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.768.799.479,00	7.590.485.337,00
EKUITAS AKHIR	39.974.878.418,00	13.998.370.268,00

Pasangkayu, 1 Januari 2020

Kepala Dinas

Ir. ARDHILLA

NIP. 196404261991031006